



RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

**TAHUN
2025**



dishubm.enim@gmail.com



[dishubmuaraenim_](#)



[dishub muara enim](#)



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jendral Sudirman lintas muara Enim-Prabumulih Kec.Muara Enim 31312
Telp.(0734)422664 ✉ dishub@muaraenim.go.id www.muaraenim.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 20 /KPTS/DISHUB/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mengalami tidak sesuai antara kegiatan, indikator, target dan anggaran, maka perlu dilakukan perubahan kegiatan, indikator, target dan anggaran yang RKPD Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tentang Rencana Kerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagaimana Diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 meliputi :

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal, Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Muara Enim



H. Junaidi, SH, M.Hum, M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19710613 199403 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan perhubungan pada Tahun 2025. Rencana Kerja SKPD ini memberikan gambaran tentang evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2025, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja tahun 2025, program/kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim serta berisikan pula masalah dan upaya penanganan sebagai upaya meningkatkan akurasi perencanaan program/kegiatan pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini didasarkan kepada :

1. Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026
2. Data Statistik Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024
4. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan program/kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR ISI

Halaman

SK Kepala Dinas Perhubungan tentang Rencana Kerja Tahun 2025

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Rencana Kerja Tahun 2024
- B. Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2024
- C. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024
- D. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk masa waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pambangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kebijakan yang berasal dari masyarakat. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat 2 dan 3 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perhubungan diwajibkan untuk menetapkan Renja-SKPD 2025, sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

Dengan telah tersusunnya program dan kegiatan tersebut, diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor perhubungan terutama dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2025

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja-SKPD) diamanatkan beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di ubah terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2012;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008; Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Muara Enim Tahun 2016 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan: 2/ME/2016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Daerah Kabupaten Muara Enim;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
 16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);

1.3 Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yaitu:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim yang mengacu RKPD Kabupaten Muara Enim dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 2024-2026.
2. Pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat Kabupaten Muara Enim.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan hingga tahun 2024 serta permasalahan yang muncul sehingga untuk kedepannya, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dapat berjalan dengan baik.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2025

Sistematika penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Rencana Kerja Tahun 2025
2. Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2025
3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025
4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2024, memperhatikan dan memuat aspek terhadap hal-hal yang terjadi terhadap program dan kegiatan yang antara lain kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja modal, belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2024, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dan pencapaian renstra SKPD sampai dengan tahun 2024, terlihat bahwa hampir semua program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim hingga bulan Maret tahun 2024 belum terealisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (Tiga) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) sub kegiatan yang dibiayai melalui

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 13.625.321.437 dan belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 2.726.439.400 terealisasi sebesar Rp. 1.184.489.204 s.d. bulan Maret 2024 atau 0,07%.

Adapun program dari kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program pelayanan administrasi perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100% target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan realisasi s.d Maret 2024 sebesar Rp. 1.099.264.189. Pagu indikatif program ini sebesar Rp.10.695.505.350,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% dan s.d Maret 2023 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.47.002.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Jumlah Renja yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 5 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.5.902.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah RKA-SKPD yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 15 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.10.654.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yaitu Jumlah RKA Perubahan-SKPD yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 6 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.5.154.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu Jumlah DPA-SKPD yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 6 Dokumen dan s.d Maret 2023 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.9.817.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yaitu Jumlah DPA Perubahan-SKPD yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 6 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.7.495.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yaitu Jumlah Dokumen LPPD yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 5 Dokumen s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 4.399.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif

subkegiatan ini sebesar Rp.3.579.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.5.397.445.422,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Jumlah Terlaksananya Gaji ASN dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 12 bulan sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 457.421.763 atau 8,50%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.5.380.710.122,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Indikator sub kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 8 Laporan dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.7.811.700,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yaitu Jumlah Laporan yang disusun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 12 Dokumen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif sub kegiatan ini sebesar Rp.8.923.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100 dan s.d Maret 2024 belum terealisasi.. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.191.475.750,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

a. Pengamanan Barang Milik Daerah

Indikator sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3/13 dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 191.475.750,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2022 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% dan s.d Maret 2024 telah mencapai Rp. 69.026.420 atau 28,90%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 343.403.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 7 Orang dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.87.587.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Jumlah Pegawai/Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Mental dan Kerohanian dan Jumlah Peserta Polbit STTD dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100 Orang dan 675 Orang sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 28,90%.

Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 238.827.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 225 Orang dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.989.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan realisasi s.d Maret 2024 sebesar Rp. 86.193.280 atau 11,67%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.1.047.949.201,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator sub kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Jumlah dan Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 20 Jenis perubahan dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 51.529.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 40 item dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 55.109.601,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Penyediaan Bahan Logistik

Indikator sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik yaitu Jumlah ATK yang tersedia dan Jumlah BBM yang tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 41 jenis dan 15 Notulen dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 131.230.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu Jumlah/Jenis Baraang Cetakan yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 12 Jenis dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 30.449.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Jumlah dan Jenis Surat Kabar yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 6 Surat Kabar dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 10.808.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 220 Laporan sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 sebesar Rp. 86.193.280 atau 11,67%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.738.501.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yaitu Jumlah Kelengkapan Penyimpanan Arsip SKPD yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024

yaitu 3 jenis dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 30.322.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.278.790.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pengadaan Mebel

Indikator sub kegiatan Pengadaan Mebel yaitu Jumlah Paket mebel yang disediakan dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 5 paket dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.68.990.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 9 unit dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 94.800.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Jumlah dan Jenis Bangunan Pendukung yang dibangun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 1 Paket dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 115.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 sebesar Rp. 481.400.326. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 2.848.258.869,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 jenis sedangkan realisasi s.d Maret 2024 sebesar Rp. 1.500.000 atau 37,14%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.4.038.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Jumlah Rekening yang Dibayar dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 4 rekening, sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 sebesar Rp. 49.280.326 atau 21,44%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.229.846.153,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Jumlah Jasa Service Perlengkapan Kantor dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 6 Laporan dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.36.654.216,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Jumlah Petugas Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 193 orang, sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 sebesar Rp.

430.620.000 atau 16,67%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.2.583.720.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu cakupan layanan perkantoran dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 1,61%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.541.180.508,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator sub kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 jenis, dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.217.534.350,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator sub kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yaitu Jumlah dan Jenis Kelengkapan Surat Kendaraan dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 jenis, sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 1,61%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.323.646.153,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 55,00%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 60% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 sebesar Rp. 85.225.015 Pagu indikatif program ini sebesar Rp.5.152.314.587,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 55,00%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 60% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 0,47%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.1.468.831.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 1 Unit dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.74.257.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 40 set guadrill, 29 unit rambu-rambu lalu lintas 75 x 75 cm terpasang dan 17 paket ZOSS sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 0,47%. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp.1.077.292.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Marka Jalan, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Jumlah Warning Light dan Traffic Light yang direhabilitasi dan dipelihara dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 625 meter, 20 meter, 2 unit dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 317.281.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024

yaitu 55,00%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 50% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 51.755.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 unit dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 51.755.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 55,00%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 50% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 47.197.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Peserta Sosialisasi Petugas Juru Parkir, Jumlah Rompi Juru Parkir yang Disediakan dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 150 Orang dan 150 Buah dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif subkegiatan ini sebesar Rp. 47.197.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2023 yaitu 90 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 90% sedangkan realisasi s.d.

Maret 2024 telah mencapai 9%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 614.697.587,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 13 unit dan s.d Maret 2023 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 200.905.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kompetensi Penguji dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3 orang dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 80.742.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kompetensi Penguji dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 32 Jenis dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 62.003.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Tersedianya Kartu Lulus Uji Elektronik dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2500 set dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 62.500.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 9 Alat dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 173.180.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 Dokumen sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah 9%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 49.142.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2023 yaitu 80%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 80% sedangkan realisasi s.d. Maret 2023 telah mencapai Rp. 60.994.700. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 1.472.812.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Jumlah Petugas Pengamanan/Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 220 Orang

dan 338 Laporan sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 4,13%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 1.370.447.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Laporan Notulen Rapat Forum Lalu Lintas dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3 Laporan sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 10,81%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 40.293.700,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Rekayasa Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Dokumen Hasil Survei Fasilitas Kelengkapan Jalan dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3 Laporan dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 62.071.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 90 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 90% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 11,38%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 70.576.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Dokumen Penilaian Hasil Andalalin dengan target capaian pada renstra yaitu 100%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 15/5 Laporan sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 11,38%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 70.576.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 95 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 95% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 61.029.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Izin Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan target capaian pada renstra yaitu 95%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 100 Laporan dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 61.029.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2024 yaitu 95 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 95% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 0,50%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 1.365.415.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah BBM yang Tersedia dengan target capaian pada renstra yaitu 95%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 2 Jenis dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 1.365.415.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator program ini yaitu terciptanya pelayanan angkutan sungai dan danau yang murah, mudah dan selamat dengan target capaian pada renstra yaitu 50%, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 50% sedangkan realisasi s.d. Maret 2024 telah mencapai 0%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 503.940.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1) Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan target capaian renstra yaitu pada tahun 2023 yaitu 50 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 50% dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 503.940.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kegiatan program ini yaitu meningkatnya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas yaitu Jumlah Dermaga yang dibangun dengan target capaian pada renstra yaitu 50 %, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 1 unit dan s.d Maret 2024 belum terealisasi. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 503.940.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

Untuk lebih jelas mengenai hasil evaluasi rencana kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, berikut dijabarkan dalam tabel 2.1:

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM S.D TAHUN 2025

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target										
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)									
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN														
2	15	01	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran													
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang Disusun	6 Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	1,00	5	Dokumen	6	Dokumen	1,00
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dan Jenis Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16 Dokumen	15	Dokumen	15	Laporan	15	Laporan	1,00	15	Dokumen	15	Laporan	0,94
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dan Jenis Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen	15	Dokumen	10	Laporan	10	Laporan	1,00	6	Dokumen	10	Laporan	1,43
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA yang Disusun	7 Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	1,00	6	Dokumen	6	Dokumen	0,86
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dan Jenis Penyusunan DPA-SKPD	7 Dokumen	6	Dokumen	10	Laporan	10	Laporan	1,00	6	Dokumen	10	Laporan	1,43
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang Disusun	3 Laporan	7	Laporan	7	Dokumen	7	Dokumen	1,00	2	Laporan	7	Dokumen	2,33
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4 Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	1,00	3	Dokumen	5	Dokumen	1,25
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen												-
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1,00	12	Bulan	12	Bulan	1,00
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	9 Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	1,00	8	Dokumen	8	Dokumen	0,89
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Aset yang Disusun	13 Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	1,00	12	Dokumen	12	Dokumen	0,92
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran													

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan					Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	1,00	3	Jenis	3	Jenis	1,00
							13	Unit	13	Unit	13	Unit	13	Unit	1,00	13	Unit	13	Unit	
2	15	2.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran														
2	15	2.01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia			220	stel										
2	15	2.01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatih Formal	8	Orang	7	Orang	7	Orang	7	Orang	1,00	7	Orang	7	Orang	0,88
2	15	2.01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	Orang Pegawai Dishub	250	Orang Pegawai Dishub	225	Orang Pegawai Dishub	225	Orang Pegawai Dishub	1,00	225	Orang Pegawai Dishub	225	Orang Pegawai Dishub	2,09
							25	Orang Sopir	25	Orang Sopir	40	Orang Sopir	40	Orang Sopir	1,00	40	Orang Sopir	40	Orang Sopir	2,09
							100	Orang Ibu PKK	0	Orang Ibu PKK	250	Orang Ibu PKK	250	Orang Ibu PKK	1,00	250	Orang Ibu PKK	250	Orang Ibu PKK	2,09
							1.000	Orang Pelajar Polbit STTD	1000	Orang Pelajar Polbit STTD	1000	Orang Pelajar Polbit STTD	1000	Orang Pelajar Polbit STTD	1,00	1000	Orang Pelajar Polbit STTD	1000	Orang Pelajar Polbit STTD	2,09
2	15	2.01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Dinas Perhubungan yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek	235	Orang		Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	225	Orang	225	Orang	2,09
2	15	2.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100	persen	100	persen										-
2	15	2.01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	21	Jenis	20	Jenis	20	Jenis	20	Jenis	1,00	20	Jenis	20	Jenis	1,05
2	15	2.01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	41	Item	43	Item	40	Item	40	Item	1,00	40	Item	40	Item	1,03
2	15	2.01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	42	Jenis	41	Jenis	41	Jenis	41	Jenis	1,00	41	Jenis	40	Jenis	1,05
						Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Tersedia	16	Notulen	15	Notulen	2	Notulen	2	Notulen	1,00	2	Notulen	2	Notulen	8,00
2	15	2.01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang cetakan dan Pengadaan yang Tersedia	13	Jenis	11	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	1,00	12	Jenis	12	Jenis	1,08
2	15	2.01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan	Jumlah dan Jenis Surat Kabar Yang Tersedia	7	Surat kabar	6	Surat kabar	6	Surat kabar	6	Surat kabar	1,00	6	Surat kabar	6	Surat kabar	1,17

[illegible]

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan					Perkiraan Realisasi Capaian Target						
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)= (5+7+9)		(11)= (10/4)
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Prasarana Jalan yang Dibangun	1	Unit Halte			2	Unit	2	Unit	1,00	2	Unit	2	Unit	0,50
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Jalan yang tersedia	12	Unit Cermin Tikungan	10	Unit Cermin Tikungan	10	Unit Cermin Tikungan	10	Unit Cermin Tikungan	1,00	10	Unit Cermin Tikungan	10	Unit Cermin Tikungan	1,20
					38		Unit Papan Nama Jalan	0	Unit Papan Nama Jalan	30	Unit Papan Nama Jalan	30	Unit Papan Nama Jalan	1,00	30	Unit Papan Nama Jalan	30	Unit Papan Nama Jalan	1,27	
					6		Unit RPPJ	8	Unit RPPJ	8	Unit RPPJ	8	Unit RPPJ	1,00	8	Unit RPPJ	8	Unit RPPJ	0,75	
					30		Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	40	Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	37	Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	37	Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	1,00	37	Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	37	Unit Rambu-Rambu Lalu Lintas	0,81	
					1		Paket ZOSS	17	Paket ZOSS	17	Paket ZOSS	17	Paket ZOSS	1,00	17	Paket ZOSS	17	Paket ZOSS	0,06	
					2		Unit Warning Light	0	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	1,00	2	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	1,00	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Trotoar dan Marka yang dipelihara	2	Unit											#DIV/0!	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Jalan	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi/dipelihara	40	Unit Rambu-Rambu	50	Unit Rambu-Rambu	20	Unit Rambu-Rambu	20	Unit Rambu-Rambu	1,00	20	Unit Rambu-Rambu	20	Unit Rambu-Rambu	2,00
					4		Unit Warning Light	5	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	1,00	2	Unit Warning Light	2	Unit Warning Light	2,00	
					4		Unit Traffic Light	0	Unit Traffic Light										#DIV/0!	
					625		m2 Marka Jalan	500	m2 Marka Jalan	625	m2 Marka Jalan	625	m2 Marka Jalan	1,00	625	m2 Marka Jalan	625	m2 Marka Jalan	1,00	
2	15	02	2.03		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fsilitas Parkir															
2	15	02	2.03	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di Rehabilitasi	2	Terminal	1	Unit	2	Unit	2	Unit	1,00	2	Unit	2	Unit	1,00
2	15	02	2.04		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fsilitas Parkir															
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Petugas Juru Parkir dan Jumlah Rompi Juru Parkir	130	Juru Parkir	130	Juru Parkir	150	Juru Parkir	150	Juru Parkir	1,00	150	Juru Parkir	150	Juru Parkir	0,87

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan					Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Pengujian Bermotor yang Tersedia	1	Alat Uji	7	Jenis	13	Jenis	13	Jenis	1,00	13	Jenis	13	Jenis	0,08
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis Bidang Pengujian yang Memiliki Kompetensi	5	Orang	2	Orang	3	Orang	3	Orang	1,00	3	Orang	3	Orang	1,67
2	15	02	2.05	0003	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Jenis Buku Registrasi WUBKB, ATK dan Cetakan yang Tersedia	32	Jenis ATK	3	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	1,00	6	Jenis	6	Jenis	5,33
							2	Jenis Kartu Induk												#DIV/0!
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Tersedianya Kartu Bukti Lulus Uji Elektronik	3.000	Set	3600	Set	2500	Set	2500	Set	1,00	2500	Set	2500	Set	1,20
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Organisasi/Perusahaan/BU MN/BUMD yang Mendapat Sosialisasi SOP	10	Organisasi/Perusahaa n/BUMN/B UMD												
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan yang Terdata di Tiap-Tiap Organisasi/Perusahaan/BU MN/BUMD	-	Kendaraan												#DIV/0!
2	15	02	2.05	0007	pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	12	Alat	9	Alat	9	Alat	9	Alat	1,00	9	Alat	9	Alat	1,33
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	Laporan												#DIV/0!
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10	Kali	2	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	1,00	2	Dokumen	2	Dokumen	5,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajem en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajaemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1,00	3	Dokumen	3	Dokumen	-

[illegible]

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan data jumlah kendaraan angkutan umum, penumpang dan parkir menunjukkan potensi yang cukup untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemungutan retribusi. Namun hal tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Terminal tipe C

Terjadi Penurunan Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi dan masuk ke dalam terminal hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan Kendaraan Umum harus Berbadan Hukum Indonesia. Selama ini seluruh angkutan umum di Kabupaten Muara Enim adalah milik Perorangan (bukan Badan Hukum) dan sampai dengan saat ini belum ada satupun Masyarakat/Pengusaha yang melibatkan perusahaan angkutan umum secara resmi.

2. Pelayanan pada UPTD pengujian kendaraan bermotor

Tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor masih kurang baik dari jumlah maupun kualifikasi (Pemula s.d. Penguji Tingkat IV) untuk saat ini Kabupaten Muara Enim baru memiliki 6 orang Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yaitu Penguji Tingkat II sebanyak 2 (dua) orang dan Pemula Penguji sebanyak 4 (empat) orang. Hal ini belum memenuhi kebutuhan Tenaga Penguji (Tingkat III dan IV) belum tersedia.

Potensi KBWU cukup banyak, namun yang aktif melaksanakan pengujian secara berkala masih rendah terutama kendaraan mobil barang dan bus yang beroperasi dalam wilayah pertambangan yang sulit untuk didatangkan ke unit pelaksanaan pengujian. Untuk itu dibutuhkan unit PKB Keliling.

3. Kondisi Perparkiran

Kondisi parkir di kabupaten Muara Enim yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah parkir di tepi jalan umum yang menggunakan badan jalan. Belum tersedianya tempat khusus parkir yang memadai untuk dikelola, pada kondisi tertentu mulai siang sampai dengan malam hari pada lokasi parkir di tepi jalan umum dijadikan sebagai lahan untuk pedagang kuliner dan kaki 5 sebagai tempat berdagang hal tersebut mengurangi potensi penerimaan

retribusi parkir. Pada titik parkir wilayah Tanjung Enim, sebagian telah dibangun menjadi bangunan pendukung kotawisata oleh PTBA .

4. Komposisi Kepegawaian

Komposisi kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim masih kurangnya tenaga fungsional dan tenaga teknis perhubungan. Saat ini hanya terdapat 6 (enam) orang tenaga fungsional yang ditugaskan pada UPTD PKB Muara Enim. Padahal tambahan kebutuhan tenaga dan peningkatan jenjang penguji tersebut sudah sangat mendesak dikarenakan rata-rata setiap bulan kendaraan yang memerlukan pengujian sebanyak 500 kendaraan. Berdasarkan hasil analisis jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim membutuhkan tenaga teknis dan tenaga fungsional sebanyak 49 orang, khususnya alumni Sekolah di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk jangka panjang penerimaan dilakukan melalui Pola Pembibitan STTD.

Adapun analisa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Muara Enim dapat dilihat padap Tabel 2.2:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2027	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio Izin Trayek										
2	Persentase Angkutan Laik Jalan		Persentase Angkutan Laik Jalan	94%	96%	97%	100%				
3	Lama Proses Pengujian Kelayakan Kendaraan										
4	Jumlah Kendaraan yang di uji berkala per tahun		Jumlah Kendaraan yang di uji berkala per tahun	2670 Unit	2713 Unit	2818 Unit	94,49%				
5	Jumlah Terminal Angkutan Umum										
6	Jumlah Angkutan Umum yang tersedia										
7	Rasio Panjang Jalan per-jumlah kendaraan										
8	Jumlah orang yang terangkut Angkutan Umum		Jumlah orang yang terangkut Angkutan Umum	474000 Orang	524000 Orang	547000 Orang	105%				
9	Jumlah Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Tersedia										
10	Jumlah Fasilitas Tempat Khusus Parkir										
11	Jumlah orang melalui terminal per-tahun										
12	Persentase Layanan Angkutan Sungai		Persentase Layanan Angkutan Sungai	50%	60%	70%	50%				
13	Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan		Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	45%	50%	55%	40%				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi umum perencanaan dan keuangan
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perhubungan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

a. Faktor internal

1) Sumber Daya Manusia

Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi aktual dimana Di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tenaga teknis yang ahli dibidang perhubungan persentasenya masih sangat rendah, SDM di bidang perhubungan masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi guna menunjang kinerja aparatur, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan pendidikan maupun keahlian (berdasarkan sertifikat keahlian).

2) Kebijakan di Bidang Perhubungan

Hal tersebut dapat diketahui dari Terbatasnya kewenangan PPNS Dishub Muara Enim dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik Jalan di luar terminal dan timbangan. Belum optimalnya pengawasan terhadap Angkutan Hal tersebut dapat diketahui dari masih Rendahnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak Dishub Muara Enim, Masih kurangnya sosialisasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terkait syarat dan kelengkapan surat menyurat kendaraan oleh petugas PPNS Dishub Muara Enim pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik jalan.

3) Sarana dan Prasarana Perhubungan

Hal ini dilihat dari Kondisi Kendaraan Dinas Aparatur yang Minim. Kendaraan dinas Kepala Dinas dan kendaraan operasional dengan kondisi sudah kurang laik, tahun pengadaan sudah lama, dan Kurangnya lahan parkir khusus di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

b. Faktor External

1) Kesadaran Masyarakat

Hal tersebut dapat diketahui dari Tingkat kesadaran pemilik kendaraan yang masih rendah, Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum, Kurangnya kesadaran dan kemauan orang untuk melalui terminal, Kendaraan penumpang tidak masuk/melewati terminal dalam hal yang disebabkan rendahnya kesadaran pemilik kendaraan penumpang untuk masuk terminal.

2) Peran Serta Masyarakat

Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi aktual dimana Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi atau ojek daripada angkutan umum, hal tersebut karena Tingginya biaya angkutan umum, Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.

3) Tingginya pertumbuhan kuantitas angkutan umum plat hitam

Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi dimana Banyaknya kendaraan plat hitam menjadi kendaraan penumpang Umum.

4) Tingginya pertumbuhan kuantitas kendaraan pribadi (roda 4 dan roda 2)

Kendaraan ojek ini menyebabkan pendapatan pemilik kendaraan yang wajib izin trayek menurun, sehingga izin trayek tidak dipenuhi, disamping itu juga adanya Permendagri No :101 Tahun 2014 bahwa setiap angkutan umum harus berbadan hukum, untuk mendirikan badan hukum minimal 5 unit kendaraan.

Dari beberapa isu tersebut, dapat ditarik isu strategis dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Muara Enim, sebagai berikut:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Perhubungan dengan merekrut aparatur yang sesuai pendidikan/keahlian yang dibutuhkan atau dengan mengadakan diklat terhadap aparatur baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri.

b. Peningkatan kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perhubungan, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), tentang angkutan penumpang dan barang, tentang kebijakan di bidang perhubungan, tentang fungsi terminal dan kelengkapan jalan.

c. Penyediaan anggaran untuk Sarana Kelancaran Aparatur Dinas Perhubungan dan Kelancaran Melaksanakan Tugas dan Fungsi.

d. Banyak Truk Melakukan Bongkar/Muat Barang dan Parkir di Badan Jalan dalam Kecamatan Muara Enim.

e. Tingginya Angka Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api. Akibat banyak Perlintasan Sebidang Belum dilengkapi Pintu Perlintasan.

f. Kurangnya Sarana Dermaga di Daerah yang ada Aktifitas Angkutan Sungai.

Adapun upaya penanganan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Memaksimalkan fungsi terminal angkutan yang ada serta melengkapi sarana dan prasarana kelengkapan terminal dan fasilitas umum lainnya didalam terminal.Revisi tarif Retribusi terminal dan Fasilitas terminal.

b. Melakukan sosiaisasi dan penertiban secara gabungan terhadap kendaraan yang menggunakan plat hitam yang digunakan mengangkut penumpang umum agar segera merubah ke plat kuning untuk menjadi angkutan umum dan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin trayek.

c. Mengajukan kepada BKPSDM untuk tambahan Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki pendidikan khusus dengan persyaratan khusus pula, diharapkan BKD Kabupaten Muara Enim dapat merekrut alumni Dipiloma Pengujian Kendaraan Bermotor serta mengusulkan PNS gol II untuk mengikuti Diklat pengujian kendaraan bermotor.

- d. Melakukan Kerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI-STTD untuk melaksanakan Program pola pembibitan, secara bertahap selama 5 Tahun.
- e. Perlu di bangun adanya tempat parkir khusus yang tidak lagi menggunakan badan jalan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator dalam bidang perhubungan.

Di samping sebagai OPD teknis yang merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim juga dibebankan tanggung jawab sebagai salah satu OPD produktif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi khusus tempat parkir, retribusi sewa loket/kios.

Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim masih berada pada *track* yang benar dan menunjukkan *performa* yang baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti pemberian insentif pungutan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010, Implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan, yang hingga kini masih belum berjalan dengan baik;

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim serta pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor lebih lanjut. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada masyarakat nantinya akan menggunakan sistem uji mekanik serta target Standar Pelayanan Minimal di bidang perhubungan Kabupaten Muara Enim dapat dicapai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan target Renstra dan tingkat kinerja OPD. Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap rancangan RKPD maka didapatkan banyak perbedaan terhadap target capaian, pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program / kegiatan dan adanya beberapa kegiatan bertambah dimana di rancangan awal RKPD tidak direncanakan namun pada hasil analisis kebutuhan kegiatan tersebut dijalankan serta adanya program kegiatan yang ketika dirancangan awal RKPD ada namun ketika analisis kebutuhan tidak dapat dijalankan. Perbedaan – perbedaan diatas dikarenakan keterbatasan alokasi dana dan kebutuhan yang mendesak di Dinas Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel T.C 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Muara Enim

SKPD : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12.553.988.644					12.007.550.014
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Panganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	60.855.498	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Panganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu		58.257.200
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.141.420	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.971.400
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	15.377.164	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	5.703.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA- SKPD	6 Dokumen	6.236.703	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA- SKPD	6 Dokumen	5.032.100
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	13.447.698	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	6 Dokumen	15.694.200
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	6 Dokumen	9.053.099	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	6 Dokumen	15.978.800

1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.323.516	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.956.800
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.275.898	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.920.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	6.515.684.688	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.440.534.719
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Terlaksananya Gaji ASN	12 Orang/bulan	6.495.771.960	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Terlaksananya Gaji ASN	12 Orang/bulan	5.425.754.219
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	9.451.915	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	5.357.200
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.460.813	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.423.300
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	235.948.124	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	204.704.250
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3/13 Dokumen	235.948.124	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3/13 Dokumen	204.704.250
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	100%	348.571.476	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	100%	1.075.898.400

4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	105.982.690	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	829.943.500
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 , 1000 , 25 , 25 Orang	222.049.036	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 , 1000 , 25 , 25 Orang	224.954.900
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225 Orang	20.539.750	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225 Orang	21.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	1.168.938.570	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	1.080.821.003
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Tersedia	20 Paket	28.536.519	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Tersedia	20 Paket	29.174.307
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	40 Paket	66.683.765	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	40 Paket	87.485.696
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Yang Tersedia dan Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	2/40 Paket	166.510.641	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Yang Tersedia dan Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	2/40 Paket	170.953.000
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	12 Paket	36.843.755	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	12 Paket	32.973.300
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Surat Kabar Yang Tersedia	6 Dokumen	13.074.050	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Surat Kabar Yang Tersedia	6 Dokumen	10.808.000

5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dan Jumlah Notulen Rapat	220/36 Laporan	857.289.840	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dan Jumlah Notulen Rapat	220/36 Laporan	749.426.700
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	190.938.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan	100%	46.300.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komputer, Jumlah Printer, Jumlah Alat Pendukung Penurunan Helikopter yang Tersedia	9 Unit	190.938.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komputer, Jumlah Printer, Jumlah Alat Pendukung Penurunan Helikopter yang Tersedia	9 Unit	46.300.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	3.390.754.906	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	2.850.321.409
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.476.879	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.192.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	294.045.325	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	300.555.193
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	43.613.502	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	27.054.216
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	193 Laporan	3.048.619.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	193 Laporan	2.519.520.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	642.297.382	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	1.250.713.033

8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	224.283.331	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	35.229.750
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	418.014.051	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	502.797.283
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	2 Kantor	130.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dan Jenis Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	2 Kantor	712.686.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek Persentase pemasangan rambu-rambu Persentase kepemilikan KIR Angkutan tak Umum		#REF!	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek Persentase pemasangan rambu-rambu Persentase kepemilikan KIR Angkutan tak Umum		6.017.749.965
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%	1.092.140.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	60%	876.544.300
1.1	Pembangunan Prasarana Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	42.500.000	Pembangunan Prasarana Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	66.700.300
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	569.640.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	462.095.800
1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pos dan Palang Pintu Perlintasan yang terpelihara	4 Unit	10.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pos dan Palang Pintu Perlintasan yang terpelihara	4 Unit	45.000.000

1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	625m, 52unit, 2unit Unit	470.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	625m, 52unit, 2unit Unit	302.748.200
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Tersedianya Pelayanan Sarana Prasarana Terminal yang Berkwalitas	65%	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Tersedianya Pelayanan Sarana Prasarana Terminal yang Berkwalitas	65%	90.000.000
2.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	0	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	90.000.000
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50%	40.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50%	49.472.500
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	150/3 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	150/3 Laporan	49.472.500
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji	96%	717.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji	96%	453.619.765
4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	13 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	13 Unit	22.906.000
4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	93.584.000
4.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Jumlah Bahan cetak Yang Tersedia	32 jenis	62.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Jumlah Bahan cetak Yang Tersedia	32 jenis	25.304.765
4.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	75.000.000

4.5	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100 Kendaraan		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	100 Kendaraan	20.274.000
4.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	220.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	148.813.700
4.6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	60.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	25.232.900
4.7	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Kendaraan	20.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	42.504.400
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas di Bidang Perhubungan	90%	1.230.500.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas di Bidang Perhubungan	90%	1.726.692.900
5.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Jumlah Petugas Pengamanan/Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	220 orang 338 Orang	1.200.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Jumlah Petugas Pengamanan/Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	220 orang 338 Orang	1.655.559.500
5.2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Paket	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Paket	50.000.000
5.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Notulen Rapat Forum Lalu Lintas	3 Dokumen	30.500.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Notulen Rapat Forum Lalu Lintas	3 Dokumen	21.133.400
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Rekomendasi Hasil Andalalin	100%	65.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Rekomendasi Hasil Andalalin	100%	43.332.500

6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15/5 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15/5 Laporan	43.332.500
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50%	1.085.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50%	2.778.088.000
8.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	1.085.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	2.778.088.000
III	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase layanan angkutan sungai		0	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase layanan angkutan sungai		206.571.200
1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau yang Tersedia	40%	0	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau yang Tersedia	40%	206.571.200
1.1	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	2 Unit	0	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	2 Unit	206.571.200

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan program dan kegiatan dilakukan melalui kegiatan musrembang yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi. Selain itu usulan program dan kegiatan tersebut bisa juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari Penelitian Lapangan yang dilakukan OPD. Usulan-usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas dari pemangku kepentingan untuk tahun 2024 dapat dilihat di tabel 2.5:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat / Desa Tahun 2025

No.	Nama Anggota	Fraksi	SKPD	Usulan Kegiatan	Penyesuaian Pagu Anggaran (Penambahan atau Pengurangan) Hasil Pembahasan	Keterangan Pembahasan	Pagu pada SIPD RI (Isi Hanya Untuk yang Penandaan atau Pelabelan)	Keterangan Tambahan dari SKPD
1	Hadiono	GOLKAR	Dinas Perhubungan	Dermaga Desa Tanjung Baru Muara Belida		Diusulkan untuk ditambahkan dengan penambahan anggaran		Sudah dianggarkan pada APBDP 2024
2	Hadiono	GOLKAR	Dinas Perhubungan	Dermaga Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida		Diusulkan untuk ditambahkan dengan penambahan anggaran	200.000.000	Sudah dianggarkan pada APBD 2024
3	Eka Ochta Reza	GOLKAR	Dinas Perhubungan	Pembangunan Tambatan Perahu Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim	80.000.000	Diusulkan untuk ditambahkan dengan penambahan anggaran		Penambahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Menurut UU No 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3, Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu Kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang memiliki arah Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mencapai Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan Hukum dan Berkeadilan;

4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan Kedaulatan Negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya Pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia Internasional.

Untuk membantu mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka dibuatlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dibagi menjadi RPJM1 (2005-2009), RPJM2 (2010-2014), RPJM3 (2015-2019), RPJM4 (2020-2024).

Skala prioritas dan Strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 adalah ditunjukkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala Bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan lptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Kebijakan umum Pembangunan Nasional Jangka Menengah pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Melanjutkan Pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta kebebasan yang bertanggung jawab;
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota) dan gender.

Selain itu RPJM Tahun 2020-2024 memiliki arah kebijakan bidang Pembangunan yaitu:

1. Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama
2. Bidang ekonomi
3. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Bidang sarana dan prasarana
5. Bidang politik
6. Bidang pertahanan dan keamanan
7. Bidang hukum dan aparatur
8. Bidang wilayah dan Tata ruang
9. Bidang SDA dan Lingkungan hidup

RPJM memiliki agenda utama dalam Pembangunan Nasional Jangka Menengah di Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Agenda I : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Agenda II : Perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Agenda III : Penegakkan pilar demokrasi;
4. Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi;
5. Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Adapun sasaran Pembangunan dalam RPJM 2020-2024 adalah:

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan;
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
3. Sasaran Penegakkan Hukum

Dalam Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 terdapat Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Prioritas 2 : Pendidikan
3. Prioritas 3 : Kesehatan
4. Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan
5. Prioritas 5 : Ketahanan Pangan

- 6. Prioritas 6 : Infrastruktur
- 7. Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- 8. Prioritas 8 : Energi
- 9. Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10. Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
- 11. Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya dijabarkan didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penyusunan RKP dilakukan untuk mencapai pilihan Alokasi Sumber Daya Nasional secara efisien dan efektif. Kebijakan Pembangunan yang digariskan dalam RKP 2024 dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1. Pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional;
- 2. Kedua untuk memperkuat Pembangunan di berbagai Bidang Pembangunan;
- 3. Ketiga untuk memperkuat Kesatuan Wilayah Pembangunan Seluruh Indonesia.

Berdasarkan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan antara lain Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta penyelenggaraan pelayanan angkutan sungai dan danau yang akan menunjang mobilitas masyarakat guna meningkatkan system perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

kinerja kedepan. Tujuan adalah pernyataan -pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional sehingga dapat dilaksanakan kedepannya. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim adalah:

1. Terwujudnya Transportasi yang Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Selamat

Sejalan dengan Program Strategi Bupati Muara Enim tentang Program Strategi Rakyat, bahwa salah satu program yang akan di wujudkan adalah Transportasi lancar dan terbuka jalan baru serta mendukung terwujudnya TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Guna mendukung dan menciptakan terwujudnya tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi adalah: “ Terwujudnya Transportasi yang murah, cepat, aman, nyaman dan Selamat ” pelayanan transportasi yang mudah yaitu ketersediaan sarana transportasi yang berarti angkutan orang maupun angkutan barang mudah didapat, cepat yang artinya tidak memerlukan waktu lama untuk keberangkatan suatu angkutan umum yakni angkutan orang aman selama perjalanan tidak ada tindak kriminal kebebasan terhadap penumpang nyaman dan tersediannya sarana angkutan orang yang laik jalan.

- 1) Tujuan pertama dari misi pertama (1.1) “Meningkatnya jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang berkualitas”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses transportasi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus transportasi barang, jasa maupun manusia serta pamarataan pembangunan disetiap wilayah serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas maupun keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan daya dukung jalan dan jembatan sehingga dapat menampung jumlah lalu lintas yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan dan perekonomian wilayah tersebut. Adapun sasaran dari tujuan pertama adalah “Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan dan jembatan guna

kelancaran transportasi barang dan jasa”. Sasaran yang ingin dicapai adalah infrastruktur jalan dan jembatan yang andal yang menunjang pengembangan di semua wilayah dengan harapan perkembangan wilayah dan ekonomi lebih cepat.

- 2) Tujuan kedua dari misi pertama (1.2) *“Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi”*. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian masyarakat berupa sawah maka dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mengalirkan air – air ke sawah guna mengairi sawah. Dengan mengalirnya air keseluruh sawah maka perekonomian masyarakat dibidang pertanian dapat lebih ditingkatkan.

Adapun sasaran dari tujuan kedua adalah *“Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah jaringan irigasi yang mampu mengairi seluruh sawah rakyat sehingga mampu meningkatkan hasil produksi padi sehingga mempercepat perkembangan perekonomian masyarakat.

- 3) Tujuan ketiga dari misi ketiga (3.3) *“Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan”*. Dalam rangka menyusun peraturan yang terkait penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan pengendalian pemanfaatan tataruang secara terpadu dan memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan) yang layak kepada masyarakat menyelenggarakan pemberian advice /rekomendasi memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian masyarakat berupa sawah maka dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mengalirkan air – air ke sawah guna mengairi sawah. Dengan mengalirnya air keseluruh sawah maka perekonomian masyarakat dibidang pertanian dapat lebih ditingkatkan.

Adapun sasaran dari tujuan kedua adalah *“Meningkatnya jaringan irigasi guna menunjang sistem pengairan lahan pertanian”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah jaringan irigasi yang mampu mengairi seluruh sawah rakyat

sehingga mampu meningkatkan hasil produksi padi sehingga mempercepat perkembangan perekonomian masyarakat.

4) Tujuan keempat dari misi ketiga (4.4) *“Mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung secara tertib sesuai dengan fungsinya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung dan mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan penyelenggaraan penataan ruang”*. Dengan menyusun peraturan yang terkait penyelenggaraan penataan ruang serta melaksanakan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang secara terpadu baik dalam pemberian rekomendasi penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional. Adapun sasaran dari tujuan pertama misi kedua adalah *“Terwujudnya ketertiban, keamanan, keamanan, keselarasan, kenyamanan dan kepastian hukum bangunan yang didirikan”*. Tersusunnya perda RTRW, kawasan strategis beserta rencana rincian dan peraturan zonasi serta merencanakan tata ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan baik dalam pembinaan mengenai penyelenggaraan tata ruang dan melakukan pemeriksaan persyaratan bangunan gedung untuk memberikan rekomendasi IMB dan sertifikasi baik fungsi bangunan gedung.

1) Tujuan pertama dari misi pertama (1.1) *“Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten yang berkualitas”*. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses transportasi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembangunan maupun pemeliharaan di bidang jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus transportasi barang, jasa maupun manusia serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas maupun keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan daya dukung jalan dan jembatan sehingga dapat menampung jumlah lalu lintas yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan dan perekonomian wilayah tersebut. Adapun sasaran dari tujuan pertama adalah *“Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang andal dengan kondisi yang berkualitas”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah infrastruktur jalan dan jembatan yang andal yang

menunjang pengembangan di semua wilayah dengan harapan perkembangan wilayah dan ekonomi lebih cepat.

- 2) Tujuan kedua dari misi pertama (1.2) *“Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi”*. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian masyarakat berupa sawah maka dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mengalirkan air–air kesawah guna mengairi sawah. Dengan mengalirnya air keseluruh sawah maka perekonomian masyarakat dibidang pertanian dapat lebih ditingkatkan. Adapun sasaran dari tujuan kedua adalah *“adalah Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah jaringan irigasi yang mampu mengairi seluruh sawah rakyat sehingga mampu meningkatkan hasil produksi padi sehinggamempercepat perkembangan perekonomian masyarakat.
- 3) Tujuan pertama dari misi kedua (2.1) *“Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan penyelenggaraan penataan ruang”*. Dengan adanya pembangunan yang bersinergi dengan penataan ruang diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang efisien, efektif dan tepat guna. Adapun sasaran dari tujuan pertama misi kedua adalah *“Terwujudnya pembangunan yang selaras dengan penataan ruang”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah keselarasan antara pembangunan yang dilakukan dengan tata ruang yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim sehingga pembangunan yang dilakukan lebih terorganisir.
- 4) Tujuan pertama dari misi ketiga (3.1) *“Mewujudkan pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang ”*. Dengan menyusun peraturan yang terkait penyelenggaraan penataan ruang serta melaksanakan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang secara terpadu baik dalam pemberian rekomendasi penertiban izin usaha jasa kontruksi nasional. Adapun sasaran dari tujuan pertama misi ketiga adalah *“Terwujudnya pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang”*. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya perda RTRW, kawasan strategis beserta rencana rincian dan peraturan zonasi serta merencanakan tata ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan baik dalam pembinaan mengenai

penyelenggaraan tata ruang dan melakukan pemeriksaan persyaratan bangunan gedung untuk memberikan rekomendasi IMB dan Sertifikasi baik fungsi bangunan gedung.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim kepada masyarakat. Adapun faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 16 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Muara Enim dengan Belanja sebesar Rp. 35.974.270.080,-. Program kegiatan Belanja yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								35.974.270.080					#REF!
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12.281.585.065					13.509.743.572
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								58.441.200					64.285.320
2	15	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Renja yang Disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	2 Dokumen	100 Persen	5.971.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	6.568.540
2	15	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah RKA SKPD yang disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5.703.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	6.273.300
2	15	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5.032.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	5.535.310
2	15	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	15.844.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	17.428.620
2	15	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang Disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	16.012.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	17.614.080
2	15	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Yang Disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	4.956.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	5.452.480
2	15	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Akuntabilitas (LAKIP) yang disusun	Tingkat Ketersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	4.920.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	5.412.990
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.714.563.543					6.286.019.897

2	15	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Terlaksananya Gaji ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	12 Bulan	100 Persen	5.699.783.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	6.269.761.347	
2	15	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5.357.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	5.892.920	
2	15	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	18 Dokumen	100 Persen	9.423.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	10.365.630	
2	15	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								204.704.250		225.174.675				
2	15	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Tersedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	9 Unit Bus dan 6 Unit Mobil Dinas	100 Persen	204.704.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	225.174.675	
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.075.735.400		1.183.308.940				
2	15	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	9 Orang	100 Persen	829.930.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	912.923.550	
2	15	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	250 Orang Pegawai Dishub 1000 Orang Siswa SMA/SMK Sederajat 25 Orang Pelajar Pelopor 25 Orang Abdiyasa	100 Persen	224.954.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	247.450.390	
2	15	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	50 Orang	100 Persen	20.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	22.935.000	
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.080.806.466		1.188.887.113				
2	15	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah dan Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	20 Jenis	100 Persen	29.168.980	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	32.085.878	
2	15	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	40 Item	100 Persen	87.479.386	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	96.227.325	
2	15	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Yang Tersedia dan Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	3 Jenis Item	40	100 Persen	170.952.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	188.047.310

2	15	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah dan Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	12 Jenis	100 Persen	32.971.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	36.268.430
2	15	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah dan Jenis Surat Kabar Yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	6 Surat Kabar	100 Persen	10.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	11.888.800
2	15	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dan Jumlah Notulen Rapat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	220 Laporan 36 Notulen	100 Persen	749.426.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	824.369.370
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								46.300.000	50.930.000				
2	15	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Peralatan Studio Audio yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	3 Jenis	100 Persen	46.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	50.930.000
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.850.321.173	3.135.353.290				
2	15	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Materai dan Buku Cek yang Tersedia	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	2 Jenis	100 Persen	3.192.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	3.511.200
2	15	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Rekening yang Dibayar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	5 Rekening	100 Persen	300.554.957	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	330.610.453
2	15	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Jasa Service Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	6 Jenis	100 Persen	27.054.216	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	29.759.638
2	15	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Petugas Pelayanan Jasa Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	188 Orang	100 Persen	2.519.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	2.771.472.000
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.250.713.033	1.375.784.336				
2	15	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	2 Jenis	100 Persen	35.229.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	38.752.725
2	15	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	2 Jenis	100 Persen	502.797.283	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	553.077.011

2	15	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah dan Jenis Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Persentase Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	100 persen	2 Kantor	100 Persen	712.686.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	100 persen	783.954.600
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								23.286.114.015				25.614.725.417	
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								17.872.193.700				19.659.413.070	
2	15	02	2,02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Prasarana Jalan (Halte) di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Persentase Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	1 Unit Halte	60 Persen	66.700.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	73.370.110
2	15	02	2,02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang disediakan Jumlah Rambu Lalu Lintas Portable yang Disediakan Jumlah Warning Light yang	Persentase Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	25 Unit 10 Unit 3 Unit	60 Persen	462.095.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	508.305.050
2	15	02	2,02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah / Kota	Jumlah Pos dan Palang Pintu Perlintasan yang terpelihara	Persentase Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	4 Unit	60 Persen	44.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	49.499.890
2	15	02	2,02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	625 Meter2 Marka Jalan 40 Unit Rambu-Rambu 6 Unit Warning Light	60 Persen	17.298.398.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	19.028.238.020
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								90.000.000				99.000.000	
2	15	02	2,03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Kantor yang terehabilitasi dan terpelihara	Persentase Tersedianya Pelayanan Sarana yang Baik	UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim	72,80 persen	1 Unit	60 Persen	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	99.000.000
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								49.472.500				54.419.750	
2	15	02	2,04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Peserta Petugas Juru parkir Jumlah Jenis Barang Persediaan	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	150 Orang Jenis	3 50 Persen	49.472.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	54.419.750
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								453.614.415				498.975.857	
2	15	02	2,05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	3 Jenis	90 Persen	22.906.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	25.196.600
2	15	02	2,05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah SDM Yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kompetensi Penguji	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	4 Orang	90 Persen	93.584.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	102.942.400
2	15	02	2,05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Jumlah Bahan cetak Yang Tersedia	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	35 Jenis Jenis	1 100 Persen	25.304.415	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	27.834.857

2	15	02	2,05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Tersedianya Kartu Bukti Lulus Uji Elektronik	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	3000 set Kartu Uji	100 Persen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	82.500.000
2	15	02	2,05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim	72,80 persen	100 Kendaraan	100 Persen	20.269.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	22.295.900
2	15	02	2,05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	9 Jenis Alat Uji	100 Persen	148.813.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	163.695.070
2	15	02	2,05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	Persentase Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	UPTD PKB Muara Enim	72,80 persen	2 Laporan	90 Persen	25.232.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	27.756.190
2	15	02	2,05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Angkutan yang Diuji Petik	Persentase Angkutan yang Diuji Petik	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	100 Kendaraan	95 Persen	42.504.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	46.754.840
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								1.999.412.900				2.199.354.190
2	15	02	2,06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Jumlah Petugas Pengamanan/Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Persentase Terwujudnya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	220 orang 338 Orang	80 Persen	1.928.279.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	2.121.107.450
2	15	02	2,06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Persentase Terwujudnya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	1 Paket	80 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	55.000.000
2	15	02	2,06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Laporan Notulen Rapat Forum Lalu Lintas	Persentase Terwujudnya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	3 Dokumen	80 Persen	21.133.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	23.246.740
2	15	02	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								43.332.500				47.665.750
2	15	02	2,07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Peserta Penilaian Andalalin dan Laporan Andalalin	Persentase Jumlah Dokumen Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	15 Orang Laporan	5 90 Persen	43.332.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	47.665.750
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2.778.088.000				3.055.896.800
2	15	02	2,09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Jumlah Kendaraan Operasional Bus Sekolah	Persentase Angkutan Umum untuk Orang/Barang yang Tersedia	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,80 persen	2 Jenis	95 Persen	2.778.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	72,80 persen	3.055.896.800
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								406.571.000				447.228.100
2	15	03	2,13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								406.571.000				447.228.100

2	15	03	2,13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terciptanya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, Mudah dan Selamat	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Bangun	Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau yang Tersedia	Kab. Muara Enim	65 persen	2 Unit	65 Persen	406.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Terciptanya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, Mudah dan Selamat	65 persen	447.228.100
---	----	----	------	------	--------------------------------------	---	--	---	-----------------	-----------	--------	-----------	-------------	------------------------------------	--	---	-----------	-------------

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

4.1 Rencana Anggaran Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sebesar Rp. 448.768.416,- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebesar Rp. 12.000.000,- Retribusi Jasa Kepelabuhan sebesar Rp. 30.591.330,- Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah (Sewa Kendaraan Pemakaian Bus) sebesar Rp. 255.816.000,- Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah (Sewa Kendaraan Pemakaian Truck Derek) sebesar Rp. 93.266.250,- Retribusi Pemanfaatan Asset Daerah (Fasilitas Terminal/Eks Terminal Regional (Berupa Kios, Loket, Toko, Pemakaian Pelataran Parkir dan Jalan Terminal) sebesar Rp. 105.310.920,-.

4.2 Rencana Anggaran Belanja

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim berdasarkan pagu indikatif direncanakan sebesar Rp. 35.974.270.080,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp.33.116.789.280,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp.2.857.480.800,-

Program kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 bersinergi dengan dokumen

perencanaan lainnya baik dokumen Perencanaan Nasional maupun dokumen Perencanaan Kabupaten.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 program dan 16 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang dibiayai melalui Belanja Operasi sebesar Rp.33.116.789.280 dan Belanja Modal sebesar Rp.2.857.480.800.

Adapun rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerja program ini yaitu Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu sarana dan prasarana perkantoran, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran direncanakan terdiri dari 8 kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 12.281.585.065,-. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program perkantoran:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Indikator kinerja program ini yaitu Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu sarana dan prasarana perkantoran, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.58.441.200,-. Berikut sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran, dan Evaluasi perangkat Daerah:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dokumen yang Disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 2 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 5.971.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPPA yang disusun cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah RKA SKPD yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 5.703.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah RKA Perubahan yang disusun, target kinerja pada tahun 205 yaitu 1 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 5.032.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.15.844.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 16.012.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 Dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 4.956.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.4.920.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok Sasaran Yaitu Tingkat ketersediaan Dokumen Keuangan dan pelaporan Keuangan, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100%. Ini terdiri dari 3 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 5.714.563.543,-. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN target kinerja pada tahun 2025 yaitu 12 bulan. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 5.699.783.043,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan Kelompok Yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang

disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 Dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 5.357.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan Kelompok Sasaran Yaitu Jumlah Laporan yang disusun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 18 Dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 9.423.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah Perangkat Daerah, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok Sasaran Yaitu Tingkat ketersediaan Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub Kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 204.704.250,-. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran:

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan Kelompok Sasaran Yaitu Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 dan Roda 6, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 9 unit dan 6 unit mobil dinas. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 204.704.250,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan kelompok Sasaran Yaitu Tingkat disiplin Pegawai Perangkat daerah, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 1.075.735.400,-. Berikut sub kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 % Yaitu 9 orang. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.829.930.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini Yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yaitu 250 Orang Dishub, 1000 Orang Siswa SMA/SMK Sederajat, 25 Orang Pelajar Pelopor, 25 Orang Orang Abdiyasa. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 224.954.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini Yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek yaitu 50 orang. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100%. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 20.850.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini Yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Tersedianya Alat Penunjang Perkantoran, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran direncanakan terdiri dari 6 sub Kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.1.080.806.466,-. Berikut kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah dan Jenis Komponen

Alat Listrik dan Elektronik yang Tersedia, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 20 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 29.168.980,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran yaitu Jumlah Paket Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 40 Item. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.87.479.386,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Bahan Logistik yang tersedia ,dengan kelompok Sasaran yaitu Jumlah Alat Tulis yang Tersedia, Jumlah Kegiatan Makan Minum Rapat target kinerja pada Tahun 2025 yaitu 40 Item, 3 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.170.952.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan kelompok Sasaran Yaitu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 12 Paket. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.32.971.300,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang.

Indikator kinerja sub kegiatan ini Yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 6 Surat Kabar. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.10.808.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan Layanan Admistrasi Perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 220 laporan, 36 Notulen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 749.426.700,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, cakupan layanan administrasi perkantoran, dengan kelompok Sasaran Yaitu Tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub Kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.46.300.000,00. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya, cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan kelompok Sasaran Yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 3 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.46.300.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini Yaitu Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan kelompok sasaran yaitu Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran, Target Kinerja pada Tahun 2025 Yaitu 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.2.850.321.173,-. Sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Materai yang Tersedia, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1

Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 3.192.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Rekening yang di Bayar, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 4 Rekening. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 300.554.957,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Cakupan Layanan Administrasi perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 6 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.27.054.216,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 188 Orang. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 2.519.520.000,-.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Ketersediaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 persen. Terdiri dari 3 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.1.250.713.033,-. Berikut Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 2 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.35.229.750,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target kinerja pada tahun 2025 Yaitu 2 Jenis pemeliharaan. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.502.797.283,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kelompok sasaran yaitu jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi , target kinerja pada tahun 2025 Yaitu 2 kantor. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.712.686.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(LLAJ)

Indikator kinerja program ini Yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ), cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas ,dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota, Target Kinerja pada Tahun 2025 Yaitu 75,45%. Program Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dan Berlalu Lintas

direncanakan terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 23.286.114.015,-. Berikut kegiatan yang mendukung program LLAJ penyelenggaraan:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas dengan kelompok sasaran yaitu Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Muara Enim dan semua Kelurahan, Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 60%. Kegiatan ini direncanakan terdiri dari 4 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 17.872.193.700,-.

Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program penyelenggaraan LLAJ:

a. Pembangunan Prasarana Jalan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pembangunan Prasarana Jalan, Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah dan Jenis Prasarana Jalan yang dibangun target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 Unit Halte. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.66.700.100,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah rambu lalu lintas, rambu lalu lintas portable dan warning light yang Tersedia, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 25 unit, 10 Unit, 3 Unit. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.462.095.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu jumlah pos dan palang pintu

perlindungan yang terpelihara, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 4 unit. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.44.999.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah perlengkapan jalan terehabilitasi dan terpelihara. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 625 Meter² marka jalan, 40 unit rambu-rambu, 6 unit warning light dan tagihan listrik LPJU. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.17.298.398.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas dengan kelompok sasaran yaitu Persentase Tersedianya Pelayanan Sarana yang Baik, Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 60%. Kegiatan ini direncanakan terdiri dari 1 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.90.000.000,-.

Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya program penyelenggaraan LLAJ:

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe c (fasilitas utama dan penunjang), Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah kantor yang terehabilitasi dan terpelihara. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 Unit. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.90.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

3. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan

Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu presentase Dokumen izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 50%. terdiri dari 1 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 49.472.500,-. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota, Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 150 Orang dan 3 Jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 49.472.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator kinerja Kegiatan ini yaitu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 66,36%. Terdiri dari 8 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.453.614.415,-. Berikut Sub kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

yang tersedia 3 Jenis pada Tahun 2025. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.22.906.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran Yaitu Jumlah SDM yang mengikuti Diklat dan peningkatan kompetensi penguji, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 4 Orang, Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.93.584.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran Yaitu Jumlah Buku WUBKB yang Terdaftar. Target kinerja pada tahun 2024 yaitu 35 Jenis/1 Jenis, Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.25.304.415,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran Yaitu Jumlah tersedianya kartu bukti lulus uji elektronik, target kinerja pada tahun 2024 yaitu 3000 set, Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

e. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 kendaraan. Pagu indikatif

kegiatan ini sebesar Rp. 20.269.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran jumlah dan jenis pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 9 Alat. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 148.813.700,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

g. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 2 laporan. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 25.232.900,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

h. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 100 kendaraan. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.42.504.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Cakupan Meningkatnya

Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Terlaksananya Manajemen Rakayasa Lalu Lintas dan Jaringan Jalan Kab/Kota , target kinerja pada tahun 2025 yaitu 80%. Kegiatan ini terdiri 3 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar dari Rp.1.999.412.900,-. Berikut sub kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

a. Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas dengan kelompok sasaran Yaitu jumlah petugas pengamanan/pengendalian lalu lintas dan parkir, Jumlah petugas pelaksana layanan angkutan lebaran, natal dan Tahun Baru, dan Jumlah Rambu Tak Bersuar. Target kinerja pada tahun 2025 yaitu 220 Orang dan 338 Unit. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.1.928.279.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

b. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS), cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran Jumlah terbangunnya zona selamat sekolah (ZOSS), target kinerja pada tahun 2025 yaitu 1 paket. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu orum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran Jumlah Laporan Forum Lalin dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 3 Dokumen. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.21.133.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan yaitu Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jalan Kab/Kota, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, dengan kelompok sasaran yaitu Tingkat Tersedianya rekomendasi Persetujuan Hasil Andalalin Kab/Kota, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 90%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.43.332.500,-. Berikut Sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas kelompok sasaran Yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 15 orang/5 laporan. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.43.332.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

7. Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, cakupan Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas, Kelompok sasaran persentase angkutan umum untuk orang/barang yang tersedia, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 95%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.2.778.088.000,-. Berikut kegiatan:

a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota, Cakupan dengan kelompok sasaran yaitu jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja

pada tahun 2025 yaitu 2 jenis. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp. 2.778.088.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

III. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Indikator kinerja program ini Persentase sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau, cakupan terciptanya pelayanan angkutan sungai dan danau, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dermaga yang dibangun, Target Kinerja pada Tahun 2025 Yaitu 65%. Program Pengelolaan Pelayaran terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp.406.571.000,-. Berikut kegiatan yang mendukung program LLAJ penyelenggaraan:

1. Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Cakupan Terciptanya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, mudah Selamat, dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di bangun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 65%. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 406.571.000,-. Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya Program peningkatan pelayanan angkutan:

a. Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau, Cakupan dengan kelompok sasaran yaitu Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun, target kinerja pada tahun 2025 yaitu 2 Unit. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar Rp.406.571.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya merupakan bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan rencana dan penggambaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui teralokasinya rencana anggaran 2025, baik untuk operasional pelayanan aparatur maupun untuk kegiatan berdasarkan Urusan Wajib dalam rangka pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Sejalan dengan kebijakan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, dimana pembangunan Kabupaten Muara Enim lebih diprioritaskan untuk melengkapi sarana dan prasarana perhubungan diharapkan pada tahun 2025 kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dapat menyentuh kepentingan masyarakat banyak baik berdasarkan peran aktif masyarakat melalui partisipasi perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) maupun berdasarkan kegiatan prioritas menurut arah pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Perhubungan Tahun 2025.